

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Isu lingkungan menjadi isu yang masih diperhatikan sampai sekarang. Salah satunya mengenai kerusakan lingkungan. Di Indonesia sendiri, kerusakan lingkungan memiliki dampak nyata akibat kurangnya perhatian dalam pengelolaan lingkungan. Kerusakan ini salah satunya berasal dari aktivitas manusia, termasuk dalam aktivitas bisnis perusahaan. Secara umum, laba dijadikan sebagai fokus utama tujuan perusahaan. Sehingga perusahaan menjadi kurang dalam memperhatikan dampak dari aktivitas bisnisnya. Berbagai proses operasi dan produksi perusahaan dapat menimbulkan dampak buruk yang akan menjadi faktor timbulnya kerusakan lingkungan.

Perusahaan dipandang bertanggung jawab pada dampak yang terjadi akibat proses dari aktivitas bisnisnya. Perusahaan tidak hanya berkontribusi pada pembangunan ekonomi saja, tetapi juga berkontribusi dalam mengatasi resiko, tantangan, dan ancaman secara berkesinambungan terhadap berbagai lingkup (Solikhah & Winarsih, 2016). Banyak pihak memberikan perhatian pada dampak lingkungan perusahaan seperti emisi gas rumah kaca, limbah, dan karbon (Akbas, 2016). Di satu sisi, lingkungan dan informasi yang berkaitan dianggap menjadi beban bagi perusahaan. Di sisi lain, terdapat apresiasi yang lebih besar terhadap produksi yang menghormati lingkungan (D'Amico et al., 2016). Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan popularitas dan signifikansi organisasi pelaporan lingkungan. Hal ini menjadikan pengungkapan lingkungan menerima publisitas yang lebih besar untuk mengungkapkan informasi lingkungan dalam

laporan tahunan (Ohidoa et al., 2016). Dengan berkembangnya trend tersebut secara internasional, perusahaan mulai memperhatikan dampak lingkungan yang terjadi karena aktivitas perusahaan. Permasalahan lingkungan kini menjadi salah satu aspek penting dalam kinerja perusahaan (Trireksani & Djajadikerta, 2016). Meningkatnya kesadaran akan kegiatan sosial dan lingkungan memacu perusahaan dalam mengomunikasikan informasi dan menanggapi beberapa kriteria persyaratan yang diperlukan (Khlif et al., 2015).

Pemerintah telah membuat kebijakan terkait isu lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Menurut UU No. 40 Tahun 2007, tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dijalankan terutama oleh perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Selain pemerintah, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) juga membuat standar akuntansi keuangan yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup agar pengungkapan tanggung jawab dapat terlaksana dengan baik. Bentuk pertanggungjawaban akuntansi dilakukan dalam bentuk laporan keuangan dengan menyajikan informasi akuntansi yang dibutuhkan. Untuk mendukung aturan tersebut, pemerintah mendorong perusahaan dengan mengembangkan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan). PROPER dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutani pada tahun 2012 untuk mendorong perusahaan melakukan pelaporan terkait lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan. Hasil penilaian diungkapkan melalui indikator 5 warna yaitu hitam, merah, biru, hijau, dan emas. Selain itu, program ini juga akan mengumumkan hasilnya pada masyarakat agar dapat mengetahui tatanan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kriteria.



Gambar 1.1 Indikator Peringkat PROPER  
Sumber : [www.proper.menlhk.go.id](http://www.proper.menlhk.go.id)

Chrysanti & Noviarini (2015) mengatakan bahwa perusahaan dapat berkontribusi pada pemmasalahan lingkungan dengan melakukan pengungkapan lingkungan. Pengungkapan lingkungan atau *environmental disclosure* menjadi salah satu bentuk penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk laporan pengungkapan terkait dengan informasi lingkungan.

*Corporate Social Responsibility* merupakan bagian dari Good Corporate Governance (GCG) yang menjadi konsep perusahaan dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan, kinerja serta kontribusi perusahaan. Good Corporate Governance adalah konsep tata kelola yang terstruktur untuk mengatur hubungan, fungsi, dan kepentingan perusahaan agar sesuai dengan sistem dan tercapainya tujuan perusahaan (Trisnarningsih, 2007). Mekanisme corporate governance yang efektif dapat meningkatkan tingkat pengungkapan perusahaan secara umum, karena corporate governance yang efektif harus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pada akhirnya menghasilkan lebih banyak pengungkapan, baik sukarela maupun wajib. Kepemilikan yang tinggi pada perusahaan baik manajerial maupun institusional akan menjadi sarana untuk memonitor manajemen, karena investor dapat

meminta manajemen mengungkapkan informasi yang dibutuhkan dalam laporan tahunan sebagai transparansi dan untuk mendapatkan legitimasi serta meningkatkan nilai perusahaan melalui pasar modal yang akan berpengaruh pada harga saham perusahaan (Pratiwi, 2015). Selain itu saran dari dewan komisaris dan keputusan dewan direksi dalam mengelola manajemen juga dapat menjadi pertimbangan dalam pengungkapan informasi.

Kegiatan pengungkapan lingkungan seharusnya tidak menjadi beban bagi perusahaan. Karena pengungkapan lingkungan dapat menjadi media komunikasi antara perusahaan dengan stakeholders, mengelola kesan publik pada kegiatan perusahaan dan memberikan dampak baik seperti membuka peluang dalam meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan secara berkelanjutan. Hal ini dapat digunakan sebagai strategi bisnis untuk mendapatkan perhatian stakeholders.

Stakeholders lebih memilih berhubungan dengan perusahaan yang memiliki pengelolaan lingkungan yang baik, karena akan menghindarkan perusahaan dari resiko yang mungkin terjadi seperti ganti rugi atas pencemaran lingkungan dan kompensasi atas kerusakan lingkungan pada masyarakat serta sanksi dari pemerintah. Perusahaan dapat terhindar dari beban yang lebih besar, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Profitabilitas menjadi pertimbangan penting dalam pengungkapan perusahaan, karena membuat manajemen bebas dalam mengungkapkan tanggung jawab kepada stakeholder (Dewi & Ratna, 2019). Tingkat profitabilitas akan menentukan sumber daya yang dapat digunakan dalam pengungkapan

perusahaan dan menjawab tuntutan serta tekanan dari masyarakat (Sari et al., 2018).

Hasil dari penilaian program PROPER 2019, dinyatakan masih terdapat 303 perusahaan dengan peringkat merah dan 2 perusahaan dengan peringkat hitam (Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, 2019). Pada tahun 2019, sub sektor dengan peringkat merah terbanyak terdapat pada sub sektor sawit sebanyak 25%, tekstil 10%, dan tambang 8%. Sedangkan pada peringkat hitam terdapat 2 perusahaan dengan sub sektor tambang dan tekstil. Hal ini menandakan masih terdapat perusahaan yang belum memenuhi kriteria pengungkapan lingkungan. Selain itu, masih terdapat fenomena kasus yang terkait dengan lingkungan yang dilakukan perusahaan seperti kasus 11 perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan serta pembalakan liar yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 18 Triliun ([www.tirto.id](http://www.tirto.id)), kasus 2 perusahaan yang mencemari sungai ([www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id)), serta masih adanya pabrik yang bermasalah dalam pengelolaan lingkungan ([www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com)).

Berdasarkan uraian diatas, dilakukan penelitian lebih lanjut. Pengujian mengenai *environmental disclosure* dilakukan dengan judul : **“Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, dan Media Exposure Terhadap Environmental Disclosure”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?
3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?
4. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?
5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?
6. Apakah media exposure berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Memperoleh bukti empiris dan mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *environmental disclosure*
2. Memperoleh bukti empiris dan mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *environmental disclosure*
3. Memperoleh bukti empiris dan mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap *environmental disclosure*
4. Memperoleh bukti empiris dan mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*
5. Memperoleh bukti empiris dan mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *environmental disclosure*
6. Memperoleh bukti empiris dan mengetahui pengaruh media exposure terhadap *environmental disclosure*

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini memiliki 2 manfaat yaitu secara teoritis dan praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi akuntansi terutama mengenai *environmental disclosure*.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

###### a. Bagi Penulis

Diharapkan dengan melakukan penelitian ini dapat memberikan manfaat bertambahnya wawasan penulis terkait dengan *environmental disclosure*.

###### b. Bagi Perusahaan

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam memutuskan dan membuat strategi mengenai pengungkapan lingkungan dan CSR untuk perusahaan kedepannya agar dapat lebih baik lagi.

###### c. Bagi Investor

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan yang membantu investor atau calon investor dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada perusahaan yang tepat.

###### d. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dengan penelitian ini dapat lebih memberikan informasi pada masyarakat dan terus mengingatkan masyarakat akan

pentingnya dalam menjaga lingkungan serta masyarakat dapat turut andil dalam mengawasi kinerja perusahaan yang berkaitan dengan tanggung jawabnya terhadap lingkungan.